

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Inklusi keuangan dimaknakan menjadi sebuah keadaan ketika layanan jasa keuangan dan produk bisa dimanfaatkan, dipakai, dan diakses dengan harga yang bisa dijangkau dan mutu yang bagus serta pengadaannya bisa disediakan kepada seluruh individu untuk menambah kemakmurannya (Gardeva & Rhyne, 2011). Harapn dari adanya inklusi keuangan yang optimal yakni mampu menciptakan kelajuan ekspansi berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi, dan menambah kemakmuran penduduk dengan merata (OJK, 2021).

Supaya tidak menimbulkan ke Gundahan pemerintah dalam membuat strategi dan usaha, antara lain dengan membuat Strategi Keuangan Inklusif (SNKI) yang memiliki intensi dalam menambah akses penduduk pada produk pelayanan keuangan. Dengan maksud supaya tidak menimbulkan disequilibrium sosial dan ekonomi di masyarakat. Peran inklusi di keuangan diantaranya bisa meminimalisir disequilibrium dan kemiskinan ekonomi antarindividu ataupun antardaerah bisa dikurangi, stabilitas sistem keuangan bisa terjaga, dan bertumbuhnya ekonomi (PP No 14, 2020).

Target pemerintah ditahun 2024 terkait inklusi keuangan digital yakni bisa mencapai sampai 90%. Dengan penguatan implementasi, akselerasi, dan sinergi digitalisasi maka apa yang menjadi target pemerintah nantinya bisa dicapai. Disejumlah negara Asia, dari tahun 2005 sampai 2013 kebanyakan inklusi keuangan mempunyai trend yang makin meningkat dengan laju rata-rata 3.7%

(Surjaningsih et al., 2011). Keuangan inklusif ialah elemen yang sangat esensial dalam proses inklusi ekonomi dan sosial yang perannya bisa menunjang pengurangan disequilibrium dan kemiskinan ekonomi antarindividu ataupun antardaerah bisa dikurangi, stabilitas sistem keuangan bisa terjaga, dan bertumbuhnya ekonomi, serta tumbuhnya kemakmuran penduduk. Mempertimbangkan esensinya kontribusi keuangan inklusi, diberbagai negara kebijakan keuangan inklusif direalisasikan oleh pemerintah.

Sesuai data World Bank dibulan September 2005, tercatat negara yang sudah mempunyai strategi nasional keuangan inklusif yakni sejumlah 31 negara dan yang masih dalam siklus perancangan strategi nasional keuangan keuangan inklusif tercatat sejumlah 27 negara. Sesuai peninjauan World Bank pada The Global Findex Database tahun 2014, dari 51% penduduk dunia yang mempunyai rekening mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 62%. Selanjutnya, di Indonesia yang sudah mempunyai rekening ditahun 2014 yakni sekitar 36,1% penduduk dengan kategori dewasa, baik rekening uang elektronik yang diakses dengan *mobile monay* (telepon seluler) (0,4%) maupun rekening pada instansi keuangan (35,9%). Apabila dipadankan dengan Kamboja, Myanmar, Philipina, dan Vietnam, taraf keuangan inklusif di Indonesia bisa dikatakan lebih tinggi. tetapi, jika dipadankan dengan Malaysia dan Thailand, taraf keuangan inklusif di Indonesia masih tergolong lebih rendah (Kementrian Keuangan, n.d.).

Di era globalisasi sekarang ini teknologi berkembang amat cepat, yang dimana pertukaran informasi menjadi sangat cepat, melalui media berupa internet. Adanya media internet dapat mempermudah berbagai kalangan khususnya generasi

milennial yang dimana pemanfaatannya sangat banyak baik dalam bertukar informasi, mengakses pemenuhan kebutuhan hiburan sampai melakukan transaksi.

Era digitalisasi juga mempengaruhi perekonomian. Indonesia mempunyai kesempatan besar dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan perluasan ekonomi digital. Teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi. memberikan pandangan tentang interaksi perkembangan inovatif dan perkembangan teknologi serta dampaknya terhadap ekonomi. Berbicara tentang teknologi semakin banyak dimanfaatkan oleh penduduk dalam mencukupi kebutuhan keseharian. Teknologi ini digunakan untuk melakukan transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari - hari.

Maraknya transaksi online yang sedang digunakan, maka muncullah sebuah inovasi industri keuangan yang di kenal dengan *financial technology (Fintech)*. Kemajuan *financial technology* telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi dari sebelumnya. *Financial technology* memberi banyak manfaat bagi para penggunanya, akan tetapi di balik kemudahannya ternyata terdapat kendala di dalamnya yang dikarenakan masih banyak yang tidak memahami tentang cara penggunaannya, atau yang dikenal dengan istilah gagap teknologi (gaptek).

Pinjaman online salah satu terobosan baru di masa kemajuan ilmu dan teknologi di era digital 4.0. Pinjaman berbasis teknologi atau pinjaman online ini salah satu perkembangan *financial technology* atau yang lazim dinamakan dengan (*fintech*). Saat ini pinjaman online menjadi alternatif untuk membantu keluar dalam kesulitan ekonomi, karena pinjaman online sangat mudah diakses hanya dengan memakai KTP dan telepon seluler serta pinjaman online menawarkan bunga yang

sangat rendah (Santi, 2019). Pengguna jasa pinjol ilegal sangat banyak dari remaja, dewasa, hingga orang tua, begitu juga dengan maraknya mahasiswa yang terjerumus masuk menggunakan jasa keuangan pinjaman *online* ilegal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka menggunakan jasa pinjaman *online* ilegal ini mulai dari keterbatasan ekonomi, ketergantungan dengan pinjaman *online* ini karena mudahnya mendapatkan uang tanpa memikirkan akibatnya, dan terpaksa meminjam pinjaman *online* ilegal hanya untuk memenuhi nafsu untuk memuaskan keinginan mereka.

Di balik kemudahan dan kepraktisan yang di tawarkan, banyak orang yang tidak bijak dalam memanfaatkan produk pinjaman *online*. Eksistensi pinjaman *online* menjadi polemic dikarenakan minimnya wawasan keuangan pada penduduk Indonesia. Tentunya perihal ini sangat beresiko di karenakan pada pinjaman online biaya administrasi tidak transparan, dimana beresiko peminjam mesti melunasi hutang melebihi perjanjian awal, di samping itu, peminjam pula mesti melunasi biaya denda apabila terlambat membayar dan beresiko terperangkap pada utang yang banyak sampai tak mampu melunasi angsurannya.

Dengan hadirnya *financial technology* bisa menunjang dan menaikkan inklusi keuangan di Indonesia dengan tujuan supaya memudahkan penduduk dalam melangsungkan transaksi, tidak sulit dalam mencari produk-produk keuangan, dan bisa menaikkan inklusi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Adapun aspek lainnya yang dapat memberi pengaruh pada inklusi keuangan yakni literasi atau wawasan keuangan. Jasa Keuangan menjelaskan literasi keuangan ialah serangkaian siklus atau kegiatan dalam menambah keterampilan (*skill*), keyakinan

(*competence*), dan pengetahuan (*knowledge*) konsumen dan penduduk luas yang nantinya mereka bisa mengatur keuangan dengan lebih efektif dan efisien (Mason & Wilson Ayu Krishna) berpendapat bahwa literasi keuangan ialah kapabilitas seseorang dalam memperoleh, memahami, dan menilai informasi yang sesuai untuk menetapkan sebuah keputusan dengan mengerti dampak atau pengaruh keuangan yang diberikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan survey nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2022 untuk mengukur indeks-indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Hasil SNLIK 2022 memperlihatkan senilai 49,68% index literasi keuangan penduduk di Indonesia, mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2019 nilainya mencapai 38,03%. Sedangkan ditahun ini, index inklusi keuangan senilai 85,10% mengalami kenaikan dibandingkan periode SNLIK sebelumnya pada tahun 2019 yakni 76,19%. Perihal itu memperlihatkan bahwa gap antara taraf inklusi dan literasi makin menyusut, yang awalnya ditahun 2019 yakni 38,16% kemudian ditahun 2022 menjadi 35,42% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

**Tabel 1. 1**

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2019 dan 2022**

<b>Indeks</b>	<b>2019</b>	<b>2022</b>
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

(Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Riset (Mindra et al., 2017) memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari literasi keuangan terhadap inklusi keuangan yang mana taraf

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan, serta konsep keuangan dasar terkait pelayanan keuangan, dihubungkan dengan kenaikan inklusi keuangan perihal mutu, pemanfaatan, dan akses diantara individu. Perbedaan riset (Natalia et al., 2020) literasi keuangan tidak terbukti berpengaruh terhadap inklusi keuangan.

Sesuai latar belakang yang ada, intensi dari riset ini yakni untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan fintech dapat mempengaruhi inklusi keuangan. Sehingga judul yang diambil pada riset ini ialah **“Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial technology* terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- Apakah Literasi keuangan berpengaruh terhadap Inklusi keuangan ?
- Apakah *Financial technology* berpengaruh terhadap Inklusi keuangan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, penelitian ini hanya berfokus terhadap fintech payment saja dan mengabaikan *financial technology* yang lainnya.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah :

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Literasi keuangan terhadap Inklusi keuangan.

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap Inklusi keuangan.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Literasi keuangan dan *financial technology* berpengaruh terhadap Inklusi keuangan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan banyak manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaat dari riset ini:

### A. Aspek Teoritis

Capaian riset ini diinginkan memberi manfaat berupa sumbangsih pemikiran pada kajian mata kuliah manajemen keuangan, khususnya terkait pengaruh *Financial technology* dan Literasi Keuangan pada Inklusi keuangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

### B. Aspek Praktisi

#### 1. Manfaat Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Capaian Hasil kajian dari riset ini dapat membantu memacu berbagai program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menunjang inklusi keuangan masyarakat dan bertujuan untuk menaikkan ekonomi penduduk serta selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah.

#### 2. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil kajian dari penelitian ini mendukung dan mendorong rencana Pemerintah yang menargetkan pencapaian inklusi ekonomi digital hingga 90 persen pada Tahun 2024.